

REFERENSI

- Abdullah, S., 2010. Manajemen Kas Daerah [WWW Document]. URL <https://syukriy.wordpress.com/2010/02/05/manajemen-kas-daerah/> (diakses 8.7.2017).
- Ali, M.Z., 2015. Mengenai TEPRA | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia [WWW Document]. URL <http://setkab.go.id/mengenai-tepra/> (diakses 14.8.2017).
- Anggarini, Y., dan Puranto, H., 2010. Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ashal, B. R., 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Perekonomian pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2014. Nomor: 06/LHP/XVIII.YOG/01/2015. Tanggal: 20 Januari 2015.
- Boyce, C., dan Neale, P., 2006. *Conducting In-Depth Interview: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interview for Evaluation Input*. [WWW Document]. URL http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/m_e_tool_series_indepth_interviews.pdf. (diakses 7.6.2017)
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methode Approach*. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Elimanafe, A.D. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Rote Ndao. Magister Ekonomi Pembangunan (MEP): Universitas Gadjah Mada.
- Halim, A., 2008. Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Halim. A., 2014a. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. A., 2014b. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Iqbal, M., 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariadi, P., Restianto Y.E., dan Bawono, I.R., 2010. *Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., N.D., 2011. *Qualitatif Research Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Herryanto, H., 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bank Indonesia, 2015., *Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV 2015*. Yogyakarta: Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Menteri Dalam Negeri, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Menteri Dalam Negeri, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Milliasih, R., 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nordiawan, D., 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia, 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan PP Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Republik Indonesia, 2015. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA).

Ritonga, I.T., 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabete.

Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. Fourth Edition. California: SAGE Publications.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)**

DHIANNITA OKTAVIANI, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak., CA

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>